

**PENGATURAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT
TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna mencapai gelar Magister Hukum



OLEH :

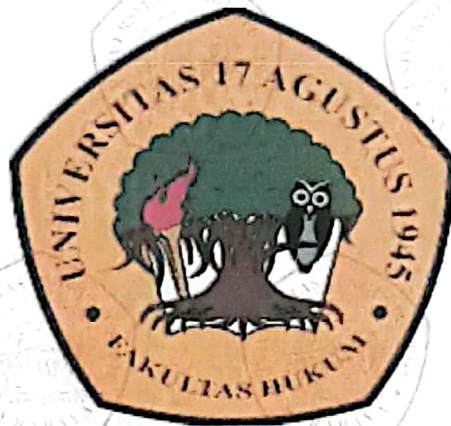
DAVID RHOMADANI
NIM : 1322100011

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PENGATURAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT
TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum**



Oleh :

DAVID RHOMADANI

NIM. 1322100011

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

TESIS
**PENGATURAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARA
PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI**

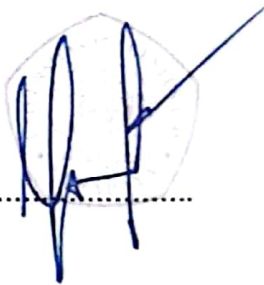
Diajukan Oleh:

DAVID RHOMADANI
NIM. 1322100011

Telah disetujui Pembimbing untuk diujikan:

Surabaya, 19 Juni 2023

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum
Pembimbing



TESIS

**PENGATURAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARA PIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Oleh:

DAVID RHOMADANI
NIM. 132210011

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal : 07 Juli 2023

Tim Penguji:

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.

Sekretaris

Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.

Anggota

Mengesahkan,
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : David Rhomadani
NIM : 1322100011
Program : Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat dengan Judul:

PENGATURAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARA PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 19 Juni 2023

Hormat saya,



David Rhomadani, S.H.



U N I V E R S I T A S
17 AGUSTUS 1945
S U R A B A Y A

BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45
SURABAYA
TLP. 031 593 1800 (EX 311)
EMAIL: PERPUS@UNTAG-
SBY.AC.ID.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Rhomadani
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya meyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

**PENGATURAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP
NARA PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 19 Juni 2023

Surabaya, 19 Juni 2023



David Rhomadani, S.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan lancar. Tesis ini sebagai persyaratan untuk mencapai gelar magister hukum strata dua di fakultas hukum , program studi magister hukum, Universitas 17 Agustus 1945 surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut di tulis tesis yang berjudul, : “PENGATURAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARA PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI” .

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat memperluas wawasan pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi demonstran dari tindakan kekerasan oleh kepolisian di tinjau dengan hukum pidana, dan di pergunakan sebaik mungkin untuk kajian bagi akademisi, penegak hukum, dan masyarakat. Selain itu, ada banyak orang yang berkontribusi untuk terselesaikannya tesis ini. Pada bagian ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pribadi-pribadi berikut :

1. Dr. Otto Yudianto, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan bantuan.
2. Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho , MM, CMA, CPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Seluruh bapak dan ibu Dosen serta Staff Tata Usaha yang telah memberikan ilmunya dan membantu saya selama menempuh pendidikan di Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Fatlillah Dan Andabiya yang merupakan kedua orang tua saya yang selalu membantu, memotivasi, serta mendoakan saya tiada henti. terimakasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang sudah di berikan untuk saya menempuh pendidikan hukum.
7. Firda Susilawati S,pd yang merupakan saudari saya yang selalu memberikan semangat, inspirasi dan senantiasa mendoakan saya.

8. Teman-teman Program Studi Magister Hukum Angkatan 46, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Terimakasih untuk kebersamaan dan semangatnya selama menempuh pendidikan.

Akhir kata ,menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa penulisan tesis ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan guna perbaikan di masa yang mendatang.

Surabaya, 19 Juni 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'DR' with a stylized flourish extending to the left.

David Rhomadani, S.H.

Abstract

Granting conditional release is indeed the right of every convict. However, in terms of granting conditional release, social, economic, political and cultural perspectives must be considered. This is so that the granting of prisoners' rights does not undermine the people's trust in law enforcement in Indonesia. One of the conditional releases that is being debated in society is the conditional release given to perpetrators of corruption. This is because corruption is an extraordinary crime. With the existence of remissions and parole, it is certain that there will not be a deterrent effect because convicts in corruption cases will be released more quickly than the time determined by the judge in court. The granting of the right to parole can also result in a decrease in public trust in law enforcement officials. This is because law enforcers can be seen as not really committed to eradicating corruption and opportunities to do the same for corruption will be wide open because the criminal justice system does not provide a deterrent effect for perpetrators of corruption. Because the crime of corruption is considered as an obstacle to the economy and development of a country, this is because the crime of corruption is a crime that is detrimental to state finances. In addition to harming the country's finances and/or economy, corruption is also seen as a criminal act that violates the basic rights of the community, namely in the form of social and economic rights of the community. Therefore, the criminal act of corruption is also referred to as an extraordinary crime, in which the handling is also extraordinary (extraordinary measures). So that in this thesis there are two formulations of the problem that will be studied, namely first the conditions for granting parole to convicts of Corruption Crimes, and secondly the arrangements for granting parole to convicts of Corruption Crimes. The research method used in this thesis is normative legal research method.

Keywords : *Parole, Prisoners, Corruption Crimes.*

Abstrak

Pemberian pembebasan bersyarat memang menjadi hak setiap narapidana. Namun, dalam hal pemberian pembebasan bersyarat, aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya harus diperhatikan. Hal ini agar pemberian hak narapidana tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Salah satu pembebasan bersyarat yang sedang diperdebatkan di masyarakat adalah pembebasan bersyarat yang diberikan kepada pelaku korupsi. Sebab, korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Dengan adanya remisi dan pembebasan bersyarat, dipastikan tidak akan menimbulkan efek jera karena terpidana kasus korupsi akan lebih cepat bebas dari waktu yang ditentukan hakim di pengadilan. Pemberian hak pembebasan bersyarat juga dapat mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Hal ini karena penegak hukum dapat dilihat tidak sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi dan peluang untuk melakukan hal yang sama terhadap korupsi akan terbuka lebar karena sistem peradilan pidana tidak memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Karena tindak pidana korupsi dianggap sebagai penghambat perekonomian dan pembangunan suatu negara, hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Selain merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara, korupsi juga dipandang sebagai tindak pidana yang melanggar hak-hak dasar masyarakat, yaitu berupa hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi disebut juga sebagai *extra ordinary crime*, yang penanganannya juga luar biasa (*extra ordinary measures*). Sehingga dalam tesis ini ada dua rumusan masalah yang akan dikaji yaitu pertama persyaratan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana Tindak Pidana Korupsi, dan yang ke dua pengaturan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu metode penelitian hukum normatif.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	9
1.5.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
1.5.2 Kajian Penelitian Terdahulu	19
1.6 Metode Penelitian	20
a. Jenis Penelitian.....	20
b. Pendekatan Masalah.....	20
c. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	21
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
e. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	22
f. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis	23
BAB II LANDASAN TEORI PENJELASAN KONSEP.....	25
2.1 Landasan Teori	25
2.1.1 Teori Keadilan	25
2.1.2 Teori Pidana	30
2.2 Penjelasan Konsep	36
2.2.1 Konsep Tindak Pidana Korupsi.....	36
2.2.2 Konsep Pembebasan Bersyarat.....	42
2.2.3 Konsep Narapidana.....	48
2.2.4 Konsep Lembaga Masyarakat	63

BAB III PEMBAHASAN.....	69
3.1 Persyaratan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana	69
3.2 Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi	81
3.3 Analisis Kasus Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI	99
BAB IV PENUTUP	103
4.1 Kesimpulan	103
4.2 Saran.....	104
DAFTAR BACAAN.....	105